
PEMBAHARUAN PEMIKIRAN ISLAM DI TIMUR TENGAH: KONTRIBUSI HASSAN AL-BANNA DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEMERDEKAAN NEGARA-NEGARA MUSLIM

Mahfud Alizar*

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nurussalam

mahfudalizar@gmail.com**Syamsul 'Aimah**

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nurussalam

syamsulaimmah89@sttinnurussalam.ac.id**Abstract**

Islamic thought reform in the Middle East has played a significant role in shaping the political, social, and religious dynamics of the region, particularly in the context of the struggle for independence from Western colonialism. One of the central figures in this reform movement is Hassan al-Banna, the founder of the Muslim Brotherhood (Ikhwanul Muslimin) in Egypt. This article discusses al-Banna's contributions to renewing Islamic thought by emphasizing the integration of Islam and politics, the implementation of Sharia, and resistance to imperialism. The research combines case study and content analysis methods, with data collected through in-depth interviews, observations, and written documents, which are then analyzed thematically. Hassan al-Banna, the founder of the Muslim Brotherhood, formulated the ideology and primary goals of this movement to establish Islam as a comprehensive system of life, encompassing all aspects of personal and social life. Al-Banna stressed the importance of implementing Sharia law in governance to create a just and moral society. The Muslim Brotherhood aims to restore the glory of Islam through social, political, and economic reforms based on Islamic teachings, with a focus on education, da'wah (Islamic preaching), and empowering the Muslim community. Additionally, the movement seeks to combat colonialism and Western influence, which is perceived as corrupting Islamic values. Al-Banna's thoughts and activities inspired resistance movements against colonialism and spurred the revival of Islam in various Muslim countries, playing a crucial role in the struggle for independence and the establishment of states based on Islamic principles.

Keywords: Hassan al-Banna, Contribution, Independence.

Abstrak

Pembaharuan pemikiran Islam di Timur Tengah telah memainkan peran penting dalam membentuk dinamika politik, sosial, dan keagamaan di kawasan ini, terutama dalam konteks perjuangan kemerdekaan dari penjajahan Barat. Salah satu tokoh sentral dalam gerakan pembaharuan ini adalah Hassan al-Banna, pendiri Ikhwanul Muslimin di Mesir. Artikel ini membahas kontribusi al-Banna dalam memperbarui pemikiran Islam dengan menekankan pentingnya integrasi Islam dan politik, penegakan syariat, serta perlawanan terhadap imperialisme. Penelitian ini menggabungkan metode studi kasus dan analisis konten, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumen tertulis yang kemudian dianalisis secara tematik. Hassan al-Banna, pendiri Ikhwanul Muslimin, merumuskan ideologi dan tujuan utama gerakan ini untuk menjadikan Islam sebagai sistem kehidupan yang menyeluruh, mencakup semua aspek kehidupan pribadi dan sosial. Al-Banna menekankan pentingnya penerapan syariah Islam dalam pemerintahan untuk membentuk masyarakat yang adil dan berakhlak. Ikhwanul Muslimin bertujuan mengembalikan kejayaan Islam melalui reformasi sosial, politik, dan ekonomi yang berlandaskan ajaran Islam, dengan fokus pada pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan umat. Selain itu, gerakan ini berupaya melawan kolonialisme dan pengaruh Barat yang dianggap merusak nilai-nilai Islam. Pemikiran dan aktivitas al-Banna menginspirasi gerakan perlawanan terhadap penjajahan dan mendorong kebangkitan Islam di berbagai negara Muslim, berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan dan pembentukan negara yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam.

Kata kunci: Hassan al-Banna, Kontribusi, Kemerdekaan.

Pendahuluan

Ketika kolonialisme Barat menguasai wilayah-wilayah Islam, ideologi materialisme pun menyusup. Dengan kedok modernisasi dan liberalisasi, Barat berhasil mengendalikan tidak hanya fisik namun juga jasmani, rohani dan pikiran umat Islam. Penjajahan Barat terhadap dunia Islam tidak hanya merampas wilayah, namun juga membawa pengaruh buruk pada pemikiran umat. Melalui modernisasi yang sesat, Barat berhasil mengubah cara pandang umat Islam, menjauhkan mereka dari Al-Qur'an dan Sunnah.(Kasim, 2010).

Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, dunia Islam mengalami periode yang penuh tantangan. Dominasi kolonialisme Barat, kemunduran ekonomi, dan stagnasi intelektual menjadi ciri khas masa itu. Kondisi ini memicu kesadaran di kalangan umat Islam akan pentingnya melakukan pembaruan dan modernisasi. Mesir telah dikuasai oleh pengaruh ekonomi Barat yang kuat. Akibatnya, para penguasa dan elite Mesir terlena dengan gaya hidup Eropa dan mengabaikan nilai-nilai Islam. Mereka bahkan menganggap budaya Barat lebih superior. (Azra, 2016).

Keunggulan teknologi militer Barat, terutama senjata dan peralatan perang, menjadi alat yang ampuh untuk memaksakan kehendak mereka pada bangsa-bangsa Islam dan memperluas pengaruh kolonial. (Negara & Febrianto, 2020). Kekuatan ekonomi yang dimiliki bangsa Barat memberikan mereka keleluasaan untuk melakukan ekspansi perdagangan ke berbagai negara. (Ahyani & Slamet, 2021) Kondisi ketidakseimbangan tersebut memungkinkan bangsa Barat untuk menghancurkan pemerintahan negara-negara Islam pada masa itu. Pada akhir abad ke-19, hampir tidak ada negara Islam yang tidak terkena dampak kolonialisme Barat. Dalam periode modern, pemikiran pembaharuan Islam mulai berkembang. Ada dua faktor utama yang mendorong kemunculan pembaharuan ini: pertama, munculnya kesadaran di kalangan ulama mengenai banyaknya ajaran asing yang masuk dan diterima sebagai ajaran Islam. Gerakan ini kemudian dikenal sebagai gerakan reformasi.(Basri et al., 2024). Kesadaran para tokoh Islam yang telah belajar atau berinteraksi dengan bangsa Barat mendorong umat Islam untuk bertindak. Gerakan-gerakan ini muncul setelah periode stagnasi panjang selama beberapa abad dan merupakan reaksi terhadap penjajahan politik, ekonomi, dan budaya Barat. Fenomena ini dikenal sebagai kebangkitan atau revitalisasi dalam dunia Islam. Baru pada pertengahan abad ke-20, dunia Islam mulai bangkit dan berusaha memerdekakan negaranya dari penjajahan Barat.(Herman et al., 2024).

Kesadaran politik yang tinggi terhadap kondisi umat Islam yang kurang beruntung telah mendorong para pembaharu, seperti Hasan al-Banna, untuk berjuang demi perbaikan nasib umat. Melalui Ikhwanul Muslimin, beliau telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi dunia Islam dengan mengajak umat islam kembali kepada cara berpikir dan bertindak berdasarkan al-quran dan

sunnah. (Wulan, 2017). Dalam penjelasannya mengenai prinsip-prinsip dasar sistem sosial Islam yang diadopsi oleh al-Ikhwan al-Muslimun, Hassan al-Banna mengajukan sebelas prinsip dalam karyanya *Bainal-Amsi wal-Yaum* (Antara Kemarin dan Hari Ini). Salah satu prinsip yang diajukan adalah penekanan pada persaudaraan di antara umat manusia, kebangkitan bersama antara pria dan wanita dalam solidaritas, serta kesetaraan hak antara pria dan wanita. Selain itu, al-Banna juga merumuskan tugas masing-masing secara rinci dan terperinci. (Dewi, 2015)

Tujuan penelitian ini adalah Mengidentifikasi dan menganalisis kontribusi Hassan al-Banna dalam pembaharuan pemikiran Islam serta Menilai dampak ideologi dan gerakan Hassan al-Banna terhadap kemerdekaan negara-negara Muslim.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggabungkan metode studi kasus dan analisis konten. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam fenomena yang kompleks, adapun sumber data terdiri dari buku-buku dan artikel tentang Hassan al-Banna, Ikhwanul Muslimin, dan pembaharuan Islam, dokumen sejarah, literatur akademik, dan wawancara dengan ahli.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi literatur dari sumber primer dan sekunder serta wawancara dengan pakar sejarah Islam dan politik timur tengah. Dan analisis data dengan analisis tematik untuk mengidentifikasi pengaruh ideologi Hassan al-Banna terhadap kemerdekaan dan analisis kontekstual tentang bagaimana pemikiran al-Banna diterjemahkan dalam gerakan kemerdekaan.

Pembahasan

A. Pemikiran Hassan al-Banna

1. Ideologi dan tujuan utama Hassan al-Banna dalam gerakan Ikhwanul Muslimin.

Hasan al-Banna berpendapat bahwa politik mencakup pemikiran tentang aspek internal dan eksternal umat. Dari segi internal, politik melibatkan pengelolaan pemerintahan, menjelaskan berbagai fungsi dan tanggung jawabnya, merinci kewajiban dan hak, serta melakukan pengawasan terhadap penguasa—menghormati mereka jika berbuat baik dan mengkritik jika melakukan kesalahan. Dari segi eksternal, politik berfokus pada menjaga kemerdekaan dan kebebasan bangsa, membantu mencapai tujuan, serta membebaskan dari penindasan dan campur tangan pihak luar (Utomo, 2023).

Yusuf al-Qaradhawi berpendapat bahwa sebelum kehadiran Hasan al-Banna dan lembaga pendidikan yang didirikannya, masyarakat Islam di Mesir memiliki pandangan yang sangat terpisah antara agama dan politik. Mereka percaya bahwa seorang yang religius tidak boleh terlibat dalam politik,

begitu pula sebaliknya (Ammariah, 2018). Sebagai salah satu tokoh sentral dalam pergerakan Islam, Hasan al-Banna menyumbangkan pemikiran politik yang komprehensif. empat konsep utama dalam pemikiran politiknya adalah Arabisme, patriotisme, nasionalisme, dan internasionalisme.

a. Arabisme ('Urubah)

Menurut Hasan al-Banna, bangsa Arab adalah umat Islam pertama dan memiliki hubungan istimewa dengan Islam. Ia menekankan pentingnya persatuan bangsa Arab untuk memperkuat Islam dan menyebarkannya ke seluruh dunia. Al-Banna berpendapat bahwa Arabisme yang dianutnya bukan semata-mata fanatisme, melainkan upaya untuk menghidupkan kembali semangat Islam.(Al-Ghazali, n.d.)

b. Patriotisme (Wathaniyah)

Hasan al-Banna mendefinisikan patriotisme menjadi tiga yaitu cinta tanah air, perjuangan untuk kemerdekaan, dan persatuan bangsa. Baginya, ini adalah nilai-nilai yang sejalan dengan ajaran Islam.

c. Nasionalisme (Qaumiyah)

Menurut Hasan al-Banna, nasionalisme yang berfokus pada upaya bersama untuk mencapai tujuan kolektif dan penghargaan atas kontribusi setiap individu adalah sesuatu yang positif dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Ia juga mengakui hak setiap kelompok untuk menikmati hasil kerja keras mereka.

d. Internasionalisme ('Alamiyah)

Menurut Hasan al-Banna, internasionalisme merupakan bagian tak terpisahkan dari Islam. Ia berpendapat bahwa Islam mengajarkan persaudaraan seluruh umat manusia, dan dakwah Islam semestinya bersifat global, menyatukan seluruh manusia dalam satu ikatan persaudaraan.

Hasan Al-Banna merasa perlu membangun sebuah gerakan yang bertujuan untuk menyadarkan umat. Untuk mencapai hal tersebut, ia membutuhkan orang-orang yang memiliki pemikiran yang sama dengannya. Di Dar Al-Ulum Al-Azhar, sebuah sekolah tinggi hukum dan perpustakaan salafiyah, ia bertemu dengan seorang ulama Al-Azhar, Syekh Yusuf Al-Dajwi, yang juga memiliki pandangan yang sejalan. Syekh Yusuf Al-Dajwi telah mendirikan sebuah organisasi yang bertujuan untuk kebangkitan Islam. Kepada Hasan Al-Banna, ia menyatakan bahwa keselamatan individu hanya dapat dicapai dengan berpegang teguh pada ajaran Islam. Ide awal Hasan Al-Banna dalam merancang program aksi adalah membentuk sebuah organisasi yang dipimpin oleh para ulama, yang bertujuan untuk menginspirasi kebangkitan Islam. Pemikirannya ini mendapat respons positif dari Muhibuddin Al-Khatib, seorang pembaharu dari Suriah yang mengelola perpustakaan-perpustakaan Salafiyah, menerbitkan jurnal mingguan untuk pembaruan Islam bernama Al-Fath, dan ikut mendirikan Asosiasi Pemuda Muslim (YMMA).

Pada tanggal 19 September 1927, Hasan Al-Banna tiba di Isma'ilyah. Saat itu, ia berusia 21 tahun dan baru saja lulus dari Dar Al-Ulum. Di kota tersebut, ia bekerja sebagai guru di sekolah pemerintah. Selama karirnya, ia berpindah-pindah dari satu kota ke kota lainnya. Meskipun begitu, profesi utamanya adalah sebagai pendakwah yang mengajak umat untuk mengamalkan al-Qur'an dan berpegang teguh pada Sunnah Nabi Muhammad SAW. Melalui usahanya, Allah SWT memberikan petunjuk kepada puluhan ribu mahasiswa, buruh, petani, pedagang, dan berbagai kalangan masyarakat lainnya. Pada tahun 1928, ketika Hasan Al-Banna berusia 22 tahun, ia mendirikan organisasi Al-Ikhwan al-Muslimun (IM), yang memiliki kemiripan dengan gerakan YMMA.

Merasa tidak puas dengan keterbatasan YMMA yang hanya berkutat pada ranah politik, Hasan Al-Banna menggagas pendirian Ikhwanul Muslimin. Ia ingin menciptakan sebuah gerakan yang tidak hanya memberikan pendidikan agama, tetapi juga mampu membawa perubahan sosial yang nyata. Dengan menggabungkan konsep guru sufi yang mendalami spiritualitas dan guru sosial yang fokus pada permasalahan masyarakat, Al-Banna berharap Ikhwan dapat menjadi kekuatan yang mampu mengubah nasib umat. Keputusan untuk mendirikan Ikhwan di Ismailiyah didorong oleh kesenjangan sosial yang mencolok antara penduduk pribumi dan penjajah. Al-Banna melihat pentingnya reformasi sosial yang menyeluruh, namun ia memilih pendekatan yang berbeda dengan gerakan Islam lokal yang lebih bersifat tradisional seperti melakukan kegiatan keagamaan di Mesjid dan melakukan ceramah di Kedai kopi. (Rizqa, 2023).

Ikhwanul Muslimun memiliki dua tujuan utama. Pertama, tujuan jangka pendek yang mencakup keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan kebajikan dan bakti sosial dalam bentuk apapun, selama kondisi memungkinkan. Kedua, tujuan utama yang lebih mendasar adalah melakukan perubahan total dan menyeluruh yang melibatkan seluruh elemen kekuatan umat. Mereka harus bekerja sama dan bersatu untuk mencapai transformasi total, dengan menerapkan nilai-nilai Islam di setiap aspek kehidupan. (Banna, 2013).

2. Pandangan al-Banna tentang hubungan antara Islam dan politik.

Menurut Hasan al-Banna, Islam dan politik seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, setiap upaya untuk memisahkan keduanya adalah sia-sia. Al-Banna berpendapat bahwa Islam mencakup aspek politik, yang di dalamnya terdapat tujuan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. (Azhimah, 2019).

Hasan Al-Banna menekankan hubungan erat antara Islam dan politik, serta sikap seorang mukmin terhadap hal tersebut. Ia mengungkapkan bahwa ketika membahas politik dan Islam, banyak orang cenderung memisahkan keduanya secara ekstrem. Mereka mencoba meyakinkan kaum Muslim bahwa Islam adalah satu hal, sementara masyarakat adalah hal lain; bahwa Islam adalah sesuatu yang berbeda dari kebudayaan, dan bahwa Islam harus dijauhkan dari politik.

Keberhasilan dakwah Rasulullah juga adalah hasil dari strategi politik yang beliau rancang dengan cermat, mulai dari hijrah ke Madinah hingga puncaknya pada Fathu Makkah (penaklukan Mekah). Ketika hijrah ke Madinah, Rasulullah dan para sahabat bukanlah melarikan diri dari intimidasi rezim kafir Quraisy, melainkan sebaliknya, mereka melakukan konsolidasi politik. Ini dimulai dengan membangun kekuatan politik internal, hingga membentuk koalisi politik dengan kaum Yahudi dan Nasrani melalui perjanjian Piagam Madinah. Menurut beliau, "Politik adalah usaha yang mempertimbangkan masalah-masalah internal dan eksternal umat."(Ruslan, 2002).

Hasan Al-Banna menghubungkan aqidah dengan aktivitas politik. Ia menyatakan bahwa seorang Muslim belum dianggap sempurna keislamannya kecuali jika ia menjadi seorang politikus yang memiliki pandangan jauh ke depan dan peduli terhadap masalah-masalah bangsanya. Keislaman seseorang mengharuskan dia untuk memberikan perhatian terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsanya. Politik bukan hanya sekadar urusan negara, tetapi juga menyangkut masalah-masalah yang berkaitan dengan agama dan moral. Ia berpendapat bahwa seorang Muslim memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam politik demi mewujudkan perubahan positif dalam masyarakat. (Al-Banna, 2005).

B. Pengaruh di negara sekitarnya

1. Studi kasus: Pengaruh pemikiran al-Banna di Mesir, khususnya dalam konteks kemerdekaan Mesir dari kolonialisme Inggris.

Inggris menerapkan sistem partai politik di Mesir sebagai bagian dari strategi kolonial mereka. Tujuan utama dari strategi ini adalah untuk mengendalikan Mesir secara tidak langsung, dengan cara melibatkan orang-orang Mesir dalam sistem politik yang telah dirancang sedemikian rupa sehingga menguntungkan kepentingan Inggris. Karena itu, sistem demokrasi liberal dibentuk, di mana partai-partai politik berkembang pesat seperti jamur di musim hujan. Ironisnya, partai-partai tersebut lebih fokus pada kepentingan politik jangka pendek dan kelompok mereka sendiri daripada membela kepentingan rakyat. Sistem parlementer dengan demokrasi liberal, yang diperkenalkan oleh Inggris di Mesir, mengadopsi sistem multi-partai yang menghasilkan banyak partai politik. (Jakes, 2020).

Hal ini lah yang dikritik Hasan al-Banna, menurutnya bahwa meskipun sistem ini mungkin cocok untuk beberapa negara, belum tentu sesuai untuk semuanya. Menurutnya, sistem multi partai yang diterapkan di Mesir tidak sesuai dengan kondisi dan situasi politik negara tersebut. Karena Mesir sedang memasuki era baru dan berusaha membangun bangsa secara kokoh, upaya ini memerlukan penyatuan potensi, pengumpulan berbagai kekuatan, pemanfaatan setiap spesialisasi, dan dedikasi penuh terhadap upaya perbaikan. (El-Ghobashy, 2005) .

Menurut Hasan al-Banna, pada saat itu Mesir belum benar-benar meraih kemerdekaan sejati. Banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan di berbagai aspek kehidupan. Karena itu, keberadaan

banyak partai politik hanya akan memicu perselisihan dan konflik, tanpa memberikan solusi nyata bagi bangsa yang baru merdeka. Mesir saat itu membutuhkan persatuan dan kesatuan untuk membangun bangsa. Hasan al-Banna berpendapat bahwa banyaknya partai politik justru bisa dimanfaatkan oleh pihak asing untuk mengacaukan kondisi umat. Alasannya sederhana, jika satu partai menang, partai lain akan mencari kelemahan lawan dan terus menunjukkan sikap oposisi. Akibatnya, rakyat hanya akan mengalami kerugian besar terkait harga diri, kemerdekaan, dan moralitas. (Khan, 2021).

Dua persoalan sosial-politik yang melingkupi Hasan Al-Banna ketika ia berupaya memperbaiki dan memperbarui umat Islam saat itu terasa sangat mendalam. Ini terlihat dari ucapannya: Ia yakin bahwa bangsanya, di tengah perubahan politik dan revolusi sosial yang mereka alami, semakin terjerumus dalam westernisasi, materialisme, dan ketergantungan pada bangsa asing, yang menjauhkan mereka dari cita-cita agama. Hal ini menyebabkan kemerosotan dalam memahami kebenaran agama dan ajarannya, membuat masyarakat awam tenggelam dalam kebodohan, serta merusak akidah. (Hayati et al., 2015).

Pemikiran dan gerakan yang dipimpin oleh Hasan Al-Banna memberikan kontribusi signifikan terhadap kesadaran nasionalisme di Mesir dan perjuangan untuk meraih kemerdekaan dari Inggris. Ikhwanul Muslimin tidak hanya berfokus pada pendidikan dan reformasi sosial, tetapi juga terlibat dalam aktivitas politik yang menentang kolonialisme. Al-Banna dan pengikutnya menggalang dukungan dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk kaum miskin dan kelas menengah, yang merasa tertindas oleh kekuasaan kolonial dan elite lokal yang korup. Gerakan Ikhwanul Muslimin menjadi salah satu kekuatan yang mendorong semangat perlawanan terhadap Inggris, meskipun gerakan ini tidak secara langsung memimpin perlawanan bersenjata. Namun, pesan Al-Banna tentang pentingnya kembali kepada Islam dan menolak dominasi asing memberikan landasan ideologis yang kuat bagi gerakan kemerdekaan di Mesir.

Setelah kemerdekaan Mesir pada tahun 1952, pengaruh pemikiran Hasan Al-Banna tetap terasa dalam politik dan masyarakat Mesir. Meskipun Ikhwanul Muslimin mengalami berbagai bentuk penindasan di bawah rezim-rezim yang berbeda, ide-ide Al-Banna tentang Islam sebagai solusi bagi masalah sosial dan politik tetap hidup dan terus mempengaruhi gerakan Islamis di Mesir dan di seluruh dunia Arab. Pemikiran Al-Banna juga memengaruhi generasi baru aktivis Islamis yang percaya bahwa Islam harus memainkan peran utama dalam kehidupan politik dan sosial. Ini terlihat dalam kebangkitan gerakan-gerakan Islamis pada dekade-dekade berikutnya, yang sering kali mengacu pada ajaran dan strategi yang dikembangkan oleh Hasan Al-Banna dan Ikhwanul Muslimin.

2. Pengaruh al-Banna terhadap gerakan politik dan sosial di negara-negara sekitarnya.

a) Yordania

Organisasi Ikhwanul Muslimin Yordania (IMY) didirikan pada 13 Ramadhan 1364 H, bertepatan dengan 19 November 1945 M, oleh H. Abd al-Latif Abu Qurah. IMY memproklamkan keberadaannya melalui koran Al-Jazirah edisi 1074 pada tahun 1945. Pada tahun 1953, IMY berubah menjadi lembaga Islam yang bersifat umum dan menyeluruh, bukan partai politik atau yayasan sosial. Perubahan ini terjadi setelah disusunnya AD/ART baru bagi IMY. (Za'rur, 2009).

IMY memiliki tujuan dan karakteristik yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Yordania, antara lain: pertama, fokus pada perbaikan akhlak individu dan dakwah; kedua, memberikan perhatian khusus pada pendidikan; ketiga, tidak melarang anggotanya untuk berpartisipasi dalam pemerintahan yang berkuasa; keempat, mengizinkan penggunaan kekerasan jika diperlukan, namun bukan melalui revolusi; kelima, mengumpulkan anggota untuk menyatukan pemikiran dan mempererat hubungan; dan keenam, menggunakan metode motivasi dan peringatan dalam perjuangan, sarana, dan dakwahnya.

Pada rentang tahun 1950 hingga 1960, IMY dianggap sebagai oposisi sah terhadap rezim Hasyim. Yordania menjadi tempat perlindungan bagi aktivis dan pemimpin Ikhwanul Muslimin Mesir (IMM) yang melarikan diri, serta pemimpin dan anggota Ikhwanul Muslimin Suriah (IMS). Salah satu pemimpin IMS, Sa'id Hawwa, tinggal di Yordania sejak 1978 hingga wafat pada tahun 1989 tanpa pernah kembali ke Suriah. IMY memusatkan aktivitasnya pada institusi keagamaan, amal, pendidikan, dakwah, dan sosial. Pada tahun 1989, IMY pertama kali berpartisipasi dalam pemilihan umum dan berhasil memenangkan 30 dari 80 kursi parlemen. Menanggapi kemenangan mengejutkan ini, Raja Hussein (1952-1999) mengubah sistem pemilihan dan melembagakan partai-partai politik di kerajaan, yang mengakibatkan penurunan kekuatan Islam, dan IMY hanya memenangkan 18 kursi pada pemilihan berikutnya. (Bozkurt & Ünalmış, 2022)

Pada 28 Oktober 1992, IMY membentuk sayap politik melalui gerakan independen bernama Front Aksi Islam (Islamic Action Front/IAF) yang menjadi perwakilan di parlemen. Pada pemilihan parlemen tahun 1994, IMY atau IAF meraih suara terbanyak. Namun, pembentukan dan kemenangan IAF menimbulkan ketegangan antara kelompok konservatif dan modernis, serta antara moderat dan radikal. Konflik internal juga muncul antara anggota kelompok Islamis independen dan anggota IMY sendiri. Pada tahun 2000-an, IMY menjadi lebih radikal dan mulai berkonfrontasi secara terbuka dengan pemerintahan Yordania di bawah Raja Abdullah II (1999-

sekarang). (Yamin, 2012). ("The Muslim Brotherhood in the Arab World and Islamic Communities in Western Europe," 2012).

b) Aljazair

Pada tahun 1931, Abdul Hamed Ben Badis (1889-1940) mendirikan Asosiasi Persatuan Ulama di Constantine, Aljazair. (Kepel, 2004). Hingga tahun 1938, organisasi ini bukanlah partai politik, melainkan memperjuangkan kebangkitan Islam dan nasionalisme, termasuk menentang penggunaan bahasa Prancis di Aljazair serta membangun sekolah dan pusat sosial untuk melawan pengaruh Barat. (Schulze, 2002). Di bawah kepemimpinan Ben Badis, tujuan utamanya bukanlah mendirikan negara Islam, tetapi membebaskan Aljazair dari cengkeraman Prancis. Slogan yang diusung adalah "Islam adalah agama saya, Bahasa Arab adalah bahasa saya, dan Aljazair adalah negara saya." (Krais, 2019). Meskipun ideologi Ben Badis mirip dengan Ikhwanul Muslimin di Mesir, pengaruhnya terbatas pada kelompok tertentu. Kegagalan dalam meraih kemerdekaan mengakibatkan seluruh masyarakat Muslim Aljazair bersatu di bawah partai Nasionalis, FLN (Front Liberation National). Pemberontakan besar terjadi pada November 1954, dan meskipun perjuangan dilakukan atas nama Tuhan, FLN tidak dianggap sebagai gerakan religius.

Setelah kemerdekaan dari Prancis pada tahun 1962, Aljazair hanya memiliki satu partai, yaitu FLN. Namun, rezim FLN kemudian mulai mengesampingkan Islam, sehingga pada tahun 1963 muncul stigma bahwa "les ulémas du mal" atau ulama adalah orang jahat. (Kepel, 2004). Menanggapi hal ini, ulama mendirikan asosiasi al-Qiyam al-Islamiyah dengan tujuan melawan westernisasi dan menegakkan nilai-nilai Islam. Pada akhir 1980-an, FLN menyingkirkan semua asosiasi saingannya dan membatasi aktivitas Islam. Perlawanan umat Muslim ditandai dengan berdirinya FIS (Front Islamique Salut) pada 10 Maret 1989, yang dipimpin oleh Ali Benhadj (1956-) dan Ali Abbas Madani (1931-). FIS berupaya mengislamkan rezim tanpa mengubah struktur dasar masyarakat. Mereka mengadvokasi pembentukan negara Islam, pendidikan Islam, hukum berbasis Syari'ah, arabisasi dalam pemerintahan dan pendidikan, serta mendukung proses demokrasi yang sejalan dengan hukum Syari'ah. Pada Juni 1990, pemilihan multipartai di Aljazair menunjukkan kekuatan FIS dengan kemenangan 62% suara, sementara FLN hanya meraih 18%. Pada tahun 1992, FIS memenangkan pemilihan secara mutlak di parlemen, namun militer mengambil alih negara, memberhentikan Presiden Chadli Benjedid pada 11 Januari 1992, membatalkan pemilihan yang seharusnya diadakan pada 13 Januari, dan membubarkan FIS pada 4 Maret 1992.

c) Uni Emirat Arab

Ikhwanul Muslimin di Uni Emirat Arab (IME) baru didirikan pada tahun 1974. Pengaruh IME lambat berkembang karena UEA baru memulai program pembangunan setelah penemuan sumber minyak pada tahun 1960-an. UEA sendiri baru merdeka dari Inggris pada tahun 1971 dan

belum memiliki universitas. Mahasiswa yang menempuh pendidikan di Mesir membawa ideologi Ikhwanul Muslimin dan mendirikan cabangnya di UEA.

Tokoh-tokoh IME yang memiliki pendidikan tinggi, seperti Saeed Abdullah Salman dan Muhammad Abu Rahman al-Baker, dengan mudahnya menjadi menteri. Saeed Abdullah Salman menjabat sebagai Menteri Perumahan dan Perencanaan Kota dari 1971-1977 dan Menteri Pendidikan dan Pemuda dari 1979-1983, sementara Muhammad Abu Rahman al-Baker menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan Waqaf dari 1971 sampai 1983. Namun, keduanya tidak diangkat kembali pada pemerintahan berikutnya yang terbentuk pada Juli 1983. (Al-Noqaidan, 2009). Hubungan antara pemerintahan UEA dan IME mulai merenggang setelah anggota-anggota IME yang menjadi menteri digantikan pada tahun tersebut. Pada tahun-tahun berikutnya, dominasi IME dalam dunia pendidikan mulai berkurang, dengan Menteri Pendidikan memberlakukan program bahasa Inggris di semua tingkat pendidikan.

Pada tahun 1978, IME menerbitkan jurnal sendiri bernama *The Islam Journal*, yang memproyeksikan citra murni gerakan IME dengan melestarikan nilai-nilai Islam, memperingatkan terhadap invasi budaya asing, serta menyerukan reformasi pemerintahan dalam bidang pendidikan dan program media televisi lokal. Kritik IME terhadap pemerintahan melalui jurnal ini mengakibatkan larangan penerbitan dari Oktober 1988 hingga April 1989. (Al-Zo'by, 2015). Salah satu topik favorit jurnal tersebut adalah pemberantasan korupsi dan cara mengelola pendapatan minyak UEA yang melimpah. Seiring waktu, IME terus menunjukkan sikap kritis terhadap pemerintahan. Konfrontasi muncul kembali ketika IME menentang pembebasan Kuwait oleh koalisi internasional pada tahun 1991. Pemerintahan UEA merespons dengan mengurangi pengaruh IME melalui cara-cara seperti merangkul gerakan Salafi yang lebih fleksibel dan memisahkan afiliasi antara IME dan Ikhwanul Muslimin. Konfrontasi diam-diam dan tidak langsung antara IME dan pemerintah UEA terus berlanjut hingga kini, dengan pemerintah UEA mulai menuntut pembubaran IME setelah pembubaran organisasi Ikhwanul Muslimin cabang Qatar pada tahun 1999.

d) Sudan

Mahasiswa Sudan yang belajar di Mesir mulai mendirikan Ikhwanul Muslimin Sudan pada tahun 1944. Di saat yang sama, sekelompok mahasiswa dari Universitas Khartoum membentuk Gerakan Pembebasan Islam (Islamic Liberation Movement atau ILM). Pada awal 1950-an, terjadi persaingan dan ketegangan antara kedua kelompok ini. Pada tahun 1954, diadakan kongres besar untuk menyatukan kedua kelompok tersebut. Kongres memutuskan bahwa nama Ikhwanul Muslimin akan digunakan untuk memperluas jangkauan organisasi mereka. Secara resmi, Ikhwanul Muslimin Sudan didirikan pada 21 Agustus 1954, dipimpin oleh al-Rashid al-Tahir (1954-1964).

Awalnya, organisasi ini hanya terdiri dari kalangan mahasiswa dan intelektual hingga pertengahan 1960-an. (Kepel, 2004). Meskipun begitu, Ikhwanul Muslimin Sudan tetap mempertahankan sikap independennya dan tidak terhubung langsung dengan Ikhwanul Muslimin Mesir.

Misi utama Ikhwanul Muslimin Sudan adalah untuk mencapai kemerdekaan Sudan. Mereka tidak mendirikan partai politik baru tetapi tetap berpartisipasi dalam politik. Tujuan utama mereka adalah memperkenalkan ajaran Islam ke dalam sistem politik yang saat itu dominan sekuler. Pemimpin Ikhwanul Muslimin Sudan yang paling terkenal adalah Hasan al-Turabi (1932-2016). Ia berpendapat bahwa organisasi tersebut harus memiliki kekuatan politik sendiri. (Zahid & Medley, 2006). Selama masa kepemimpinannya, Hasan Turabi mendirikan beberapa partai untuk memberikan wadah politik bagi Ikhwanul Muslimin Sudan, di antaranya IFC (Islamic Front for the Constitution) pada tahun 1958, ICF (Islamic Charter Front) pada tahun 1964, dan NIF (National Islamic Front) pada tahun 1986. Pada tahun 1986, NIF memperoleh 20% suara dari kelas menengah perkotaan. Ikhwanul Muslimin Sudan juga memperkenalkan perbankan syariah kepada Presiden.

Pada November 1965, ketika seorang komunis Suriah mencemooh agama dalam pidatonya di hadapan masyarakat umum Sudan, Ikhwanul Muslimin Sudan mengadakan demonstrasi yang menyerukan pelarangan paham sekularisme. Salah satu keberhasilan ICF terjadi pada Mei 1969 ketika partai-partai sektarian di Sudan menyetujui prinsip-prinsip konstitusi Islam. Namun, kesuksesan ini terhambat oleh kudeta militer, di mana pemerintahan kemudian dikuasai oleh partai kiri. Sebagian besar partai politik, termasuk ICF, dilarang, dan pemimpinnya, Hasan Turabi, dipenjara selama beberapa tahun. Namun, pada tahun 1977, Turabi dibebaskan dan mulai bekerja sama dengan pemerintahan sehingga memungkinkan dirinya untuk melanjutkan aktivitas Islam tanpa dicurigai. (Zahid & Medley, 2006). Pada tahun 1989, Turabi menjadi pemimpin rezim Islam yang mengambil alih kekuasaan melalui kudeta militer. Ia berpendapat bahwa Islam dapat mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh imperialisme Barat, nasionalisme Arab maupun ideologi lainnya dan rezim Islam harus berkuasa dengan cara demokratis daripada melalui revolusi. (Kapteijns, 2010). Secara internasional rezim Turabi ini mendukung kelompok Islam yang ingin berjuang seperti di Zaire, Uganda dan Ethiopia.

e) Pakistan

Organisasi al-Jama'at al-Islamiyah (JI) di Pakistan merupakan sebuah organisasi yang dipengaruhi oleh Ikhwanul Muslimin. JI didirikan oleh Abu al-A'la al-Maududi (1903-1979) pada 21 Agustus 1941, dengan latar belakang perjuangan kemerdekaan dari penjajahan Inggris dan keinginan untuk mendirikan partai berasaskan Islam murni. JI berperan aktif dalam politik Pakistan dengan tujuan membangun sistem Islam melalui cara konstitusional. (Moten, 2002). Pada akhir

tahun 1947, Maududi menyatakan bahwa ia tidak akan berperang demi Pakistan karena menurutnya hal tersebut tidak sesuai dengan sikap seorang Muslim. Namun, pada bulan Oktober, ia ditangkap dan dipenjara hingga Mei 1950 dengan tuduhan sebagai dalang kerusuhan di Kashmir. (Majid, 2022). Misi JI adalah menciptakan negara Islam di Pakistan. Selain kegiatan politik, JI juga menjalankan program publikasi dan pekerjaan sosial. Salah satu program positif JI yang dimulai sejak Februari 1952 adalah layanan medis gratis. Hingga tahun 1955-1956, layanan ini tersebar di sekitar 130 titik di seluruh Pakistan dan telah memberikan bantuan kepada 1.837.430 orang. Pendanaan program-program JI berasal dari iuran anggota, wakaf, dan infaq. (Inggita, 2018).

Hubungan antara JI dan Ikhwanul Muslimin sangat erat. (Kepel, 2004). Karena kesamaan metode dan ideologi. Beberapa kesamaan di antaranya adalah keyakinan bahwa menegakkan "kedaulatan Tuhan di muka bumi adalah kewajiban seorang Muslim" yang bersifat global, strategi untuk meningkatkan kesadaran Islam di kalangan massa, dan visi universalisme Islam yang ditegaskan oleh pendirinya. Maududi percaya bahwa "Islamisasi harus dilakukan dari atas melalui negara yang melaksanakan kedaulatan atas nama Allah dan menerapkan syari'ah," serta menyatakan bahwa politik adalah bagian integral dari keyakinan Islam yang tak terpisahkan.

Maududi menyebarkan ideologinya melalui buku-buku yang ia tulis sendiri, seperti *Toward Understanding of Islam* (1930) dan *Purdab* (1939). Ia juga menulis buku berjudul *Jihad fi Sabilillah* (Jihad di Jalan Allah), yang menguraikan gagasan tentang jihad, pengaruh Ikhwanul Muslimin terhadap JI, dan kesamaan pemikiran dengan Hasan al-Banna. Buku-buku ini menjadi referensi bagi anggota Ikhwanul Muslimin dan gerakan kebangkitan Islam lainnya.

Kesimpulan

Hassan al-Banna, pendiri Ikhwanul Muslimin (Muslim Brotherhood), merumuskan ideologi dan tujuan utama gerakan ini untuk mempromosikan Islam sebagai sistem kehidupan yang komprehensif. Ideologi al-Banna berpusat pada penerapan syariah Islam dalam semua aspek kehidupan, baik pribadi maupun sosial, serta pembentukan negara Islam yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Tujuan utama gerakan Ikhwanul Muslimin adalah mengembalikan kejayaan Islam melalui reformasi sosial, politik, dan ekonomi yang berlandaskan ajaran Islam. Al-Banna menekankan pentingnya pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan umat Islam untuk mencapai transformasi masyarakat secara bertahap menuju tatanan Islam yang ideal. Gerakan ini juga berupaya melawan kolonialisme dan pengaruh Barat yang dianggap merusak nilai-nilai Islam. Hassan al-Banna memandang bahwa Islam dan politik tidak dapat dipisahkan. Baginya, Islam adalah sistem yang komprehensif yang mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk politik. Al-Banna percaya bahwa penegakan syariat Islam dalam pemerintahan dan kehidupan publik adalah esensial untuk mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berakhlak. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya integrasi antara ajaran-ajaran Islam dengan pemerintahan, sehingga politik

menjadi sarana untuk mengimplementasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam secara menyeluruh dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Hassan al-Banna memberikan kontribusi yang besar melalui pemikiran dan gerakan Ikhwanul Muslimin, yang menginspirasi perlawanan terhadap penjajahan dan mendorong kebangkitan Islam di negara-negara Muslim. Pemikirannya menekankan bahwa pembebasan dari kolonialisme dan penegakan syariat Islam adalah bagian integral dari perjuangan umat Islam. Al-Banna mempromosikan kesadaran akan identitas Islam dan persatuan umat sebagai kekuatan utama dalam melawan imperialisme. Pengaruhnya meluas di luar Mesir, memotivasi gerakan-gerakan Islam di berbagai negara Muslim untuk berjuang demi kemerdekaan, reformasi sosial, dan penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bernegara. Dengan demikian, pemikiran dan gerakannya memainkan peran penting dalam membentuk arah perjuangan kemerdekaan di dunia Muslim.

Daftar Pustaka

- Ahyani, H., & Slamet, M. (2021). Respon dunia barat terhadap ekonomi syariah di era revolusi industri 4.0. *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, 2(2), 220–235.
- Al-Banna, H. (2005). *Risalah Gerakan Ikhwanul Muslimin jilid II*. Al-I'tishom.
- Al-Ghazali, A. H. (2001). *Meretas Jalan Kebangkitan Islam: Peta Pemikiran Hasan al-Banna (Haula Asasiyat al-Masyru' al-Islami Linabdhah al-Ummah-terj. Wahid Ahmadi & Jasiman)*. Era Intermedia.
- Al-Noqaidan, M. (2009). *Muslim Brotherhood in UEA Expansion and Decline*. Al-Mesbar Center for Studies and Research.
- Al-Zo'by, M. (2015). Discourse and Oppositionality in the Arab Spring: the case of the Muslim Brotherhood in the UEA. *International Sociology*, 30.
- Ammariah, H. (2018). Studi Pemikiran Hasan Al-Banna Tentang Negara Islam. *Aqlania*, 9(2), 155–192.
- Azhimah, A. (2019). *Pengaruh pemikiran politik Hasan Al-Banna terhadap ideologi Partai Ikhwanul Muslimin di Mesir*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Azra, A. (2016). *Transformasi politik Islam: radikalisme, khilafatisme, dan demokrasi*. Kencana.
- Banna, H. Al. (2013). *Mudzakkiratud Da'wah Wad Da'iyah*. Era Adicitra Intermedia.
- Basri, M., Surodipo, B., Fadillah, N., & Simbolon, N. (2024). Penjajahan Barat atas Dunia Islam dan Perjuangan Kemerdekaan Negara-Negara Islam. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(6).
- Bozkurt, A., & Ünalmiş, M. (2022). Partnership and rescue party and the transformation of political opposition in Jordan. *Religions*, 13(2), 136.
- Dewi, R. (2015). Pemikiran Politik Hasan Al-Banna. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 15(2), 75–88.
- El-Ghobashy, M. (2005). The metamorphosis of the Egyptian Muslim brothers. *International Journal of*

- Middle East Studies*, 37(3), 373–395.
- Hayati, S. H. S., Isjoni, I., & Saiman, M. S. M. (2015). *Peranan imam syahid Hasan al-Banna dalam mengembangkan Ikhwanul Muslimin di Mesir pada tahun 1928-1949*. Riau University.
- Herman, H., Dahlan, M., & Rahmawati, R. (2024). Penjajahan Barat Dan Perjuangan Kemerdekaan Negara-Negara Islam. *Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 7(1), 532–539.
- Inggita, P. (2018). *Peran ikhwanul muslimin suriab dalam bidang sosial dan agama Tabun 1945-1982*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Adab dan Humaniora, 2018.
- Jakes, A. G. (2020). *Egypt's Occupation: colonial economism and the crises of capitalism*. Stanford University Press.
- Kaptein, L. (2010). Sudan in Turmoil: Hasan al-Turabi and the Islamist State, 1989-2003. *The International Journal of African Historical Studies*, 43(2), 393.
- Kasim, M. (2010). HASAN AL-BANNA (Problematika Islam Mesir dan Da'wah). *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, 2(2), 220–229.
- Kepel, G. (2004). *Jihad: The Trial of Political Islam*. 1.B. Tauris.
- Khan, S. R. (2021). Debates on political Islam: Analyzing the writings of Egyptian scholars, Hasan al Banna and Sayed Qutb. In *Handbook of Contemporary Islam and Muslim Lives* (pp. 341–359). Springer.
- Krais, J. (2019). Muscular Muslims: Scouting in Late Colonial Algeria between Nationalism and Religion. *International Journal of Middle East Studies*, 51(4), 567–585.
- Majid, I. (2022). Confronting the Indian state: Islamism, secularism, and the Kashmiri Muslim question. *International Journal of Asian Studies*, 19(1), 67–80.
- Moten, A. R. (2002). *Revolution to Revolution Jama'at-e-Islami in the Politics of Pakistan*. Islamic Book Trust.
- Negara, A. K., & Febrianto, H. G. (2020). Pengaruh Kemajuan Teknologi Informasi Dan Pengetahuan Investasi Terhadap Minat Investasi Generasi Milenial Di Pasar Modal. *Business Management Journal*, 16(2), 81–95.
- Rizqa, H. (2023). *Biografi Hasan al-Banna, Sang Pendiri IM*. <https://republika.id/posts/46522/biografi-hasan-al-banna-sang-pendiri-im>
- Ruslan, U. A. M. (2002). *Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin: Studi Analisis Evaluative Terhadap Proses Pendidikan Politik Ikhwan Untuk Para Anggota Khususnya dan Seluruh Masyarakat Mesir, Dari Tahun 1928 Hingga 1945*. Era Intermedia.
- Schulze, R. (2002). *A Modern History of the Islamic World*. New York University Press.
- The Muslim Brotherhood in the Arab World and Islamic Communities in Western Europe. (2012). *The Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center*.
- Utomo, W. W. (2023). *Pemikiran Politik Islam*.
- Wulan, S. (2017). *Konsep Pendidikan Islam Menurut Hasan Al-Banna (1906-1949M) dalam Kitab "Risalatut*

Ta'aalim." IAIN Metro.

Yamin, M. dan B. I. A. (2012). *Taktik Mengembangkan Kemampuan Individual Siswa*, (G. Persada (Ed.)).

Za'rur, A. (2009). *Seputar Gerakan Islam*. al-Azhar Press.

Zahid, M., & Medley, M. (2006). Muslim Brotherhood in Egypt and Sudan. *Review of African Political Economy, Religion, Ideology and Conflict in Africa, Vol. 33, N.*